

# Internalisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Madya Pematang Siantar

## *Internalization of Community Empowerment in Improving the Quality of Slum Settlements in Pematang Siantar City*

Rita Vinolia Aruan<sup>1)</sup>\* & Nelly Marina Rawaty Sinaga<sup>2)</sup>

1) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Darma Agung, Indonesia

2) Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Darma Agung, Indonesia

Diterima: 29 September 2020; Direview: 30 September 2020; Disetujui: 13 November 2020

Email :vinoliarita@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pola-pola pemberdayaan masyarakat, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penghambat internalisasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Martoba Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Madya Pematang Siantar. Masalah difokuskan pada permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Madya Pematang Siantar dimana kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut menjadi rumit. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori internalisasi, pemberdayaan masyarakat dan permukiman Kumuh. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus tetap dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, sampai melakukan pemeliharaan agar kualitas lingkungan minimal sama, atau bila dimungkinkan kualitasnya meningkat dengan adanya partisipasi aktif dari warga masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan, seperti mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga-lembaga formal dan non-formal, menentukan dan mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab warga, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, pemeliharaan lahan dan air, dan potensi alam lingkungan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukimannya.

**Kata Kunci:** Internalisasi; Pemberdayaan; Masyarakat; Permukiman; Kumuh

### Abstract

*Slums are considered as parts of the town were very unproductive, dirty, do not have the potential, not efficient and unobtrusive aesthetics and beauty, where slums are often regarded as the emergence of a variety of deviant behavior, such as crime and other social ills sources. But behind it all, let us look at some areas that initially slum turned into a environmentally friendly, clean, and beautiful. Various programs have been implemented properly, people are still expected to perform management and maintenance of the environment through pure consciousness in various forms of participation. Enterprises utilizing, foster, and preserve the natural surroundings is a positive effort in improving the quality of housing environment, because if not so then the environment will be back to slum areas. The community empowerment must still be done to maintain, improve, in order to perform maintenance of environmental quality at least equal, or, if feasible quality increases with the active participation of citizens. The success of community empowerment in the management and maintenance of settlements can be seen from the efforts undertaken, such as optimizing the function and role of institutions of formal and non-formal, define and regulate the rights, obligations and responsibilities of citizens, organize and menyelenggarakan allocation, use, supply, maintenance of land and water, and the potential of the natural environment in improving the quality of settlement environment.*

**Keywords:** Internalization; Community; Improving; Slums.

**How to Cite:** Aruan, R.V., & Sinaga, N.M.R., (2020). Internalisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Madya Pematang Siantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (2): 761-768.



## PENDAHULUAN

Penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus merupakan upaya terpadu yang saling mendukung dan bersinergi dari berbagai pihak terkait dalam mencapai sasaran yang optimal. Perlu ada kesamaan persepsi dalam penetapan sasaran, langkah dan waktu yang tepat untuk mengimplementasikannya, dalam hal ini peran pemerintah sangat vital sebagai fasilitator dan pemberdaya dari semua tindakan yang akan diambil.

Salah satu isu permasalahan perkotaan adalah pada Bidang Struktur Ruang Kota, dimana banyaknya permukiman kumuh yang tidak tertangani. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang, lemahnya kemampuan pengawasan dan pengendalian pembangunan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, serta belum terciptanya semangat dan mekanisme kerjasama lintas wilayah dalam pembangunan yang sinergis.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan menggunakan berbagai pola-pola pendekatan yang bersifat holistik. Perbaikan kualitas lingkungan permukiman yang pernah dilakukan diantaranya adalah: pemugaran rumah, bantuan teknik, rumah contoh, perbaikan kampung yang meliputi prasarana jalan dan saluran, perbaikan sanitasi dan penyediaan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Program ini didukung konsep asas tri daya, yaitu pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran maupun kemampuan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Berbagai isu di atas juga diduga terjadi di Kota Pematang Siantar mengingat kota tersebut sudah beberapa kali berhasil meraih Anugerah Adipura. Namun pendekatan yang dilakukan belum optimal, lebih banyak bersifat sektoral dan tidak terintegrasi sehingga menyebabkan kawasan yang telah tertangani berpotensi menjadi kumuh kembali dan secara bertahap terjadi pengurangan kualitas lingkungan atas kawasan tersebut.

Berdasarkan pra penelitian yang kami tinjau Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba merupakan daerah kumuh dimana legalitas tempat tidak ada. Daerah ini merupakan garapan dari PTPN III. Tidak hanya tempat yang kumuh tetapi juga sumber daya manusia dengan akhlak yang rendah dibuktikan dengan menjamurnya Pekerja Seks Komersial (PSK) dan cafe remang-remang. Hal itu menjadi sangat miris ketika di lokasi tersebut terdapat tempat ibadah, Kantor Dinas kebersihan dan kampus. Kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut menjadi rumit.

Kelurahan Tanjung Pinggir adalah tempat pembuangan sampah akhir yang berasal dari berbagai daerah Kabupaten Simalungun. Penduduk setempat memanfaatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai mata pencaharian mereka untuk memulung sampah. Sedangkan wanita berprofesi sebagai PSK menjajakan dirinya secara terang-terangan di pinggir pasar pada sore hari. Hal ini dapat berdampak buruk kepada tumbuh kembang anak.

Melihat latar belakang di atas maka, perlu dilakukan penelitian dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga diperlukan kajian dan telaah pemberdayaan masyarakat secara mendalam dengan tujuan khusus untuk menemukan kembali pola-pola pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kecamatan Martoba Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Madya Pematang Siantar. Sementara itu sasarannya adalah masyarakat sehingga dapat memahami dan mampu melakukan pemberdayaan secara mandiri. Anwas (2013) mengatakan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non-teknis. Suatu permukiman dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di permukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan.

Permukiman kumuh umumnya di pusat-pusat perdagangan, seperti pasar kota, perkampungan pinggir kota, dan di sekitar bantaran sungai kota. Kepadatan penduduk di daerah-daerah ini cenderung semakin meningkat dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan asal daerah. Perhatian utama pada penghuni permukiman ini adalah kerja keras mencari

nafkah atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tetap bertahan hidup, dan bahkan tidak sedikit warga setempat yang menjadi pengangguran.

Penelitian Niken Fitria dan Rulli Pratiwi Setiawan (2014), berjudul "Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat". Dengan tujuan untuk merumuskan arahan yang tepat terkait peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Hasil penelitian pada permukiman kumuh ringan, keberadaan kegiatan ekonomi yang berada disekitarnya turut mempengaruhi karakter yang dimiliki oleh permukiman tersebut, seperti misalnya dalam hal kondisi prasarana drainase, asal daerah masyarakat, status kependudukan masyarakat, asal pemilihan lokasi bermukim, dan juga jenis pekerjaan masyarakat, masing-masing permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Kapuk memiliki karakteristiknya masing-masing. Setelah dilakukan identifikasi, didapatkan karakteristik yang dimiliki oleh permukiman kumuh di wilayah studi yang ditinjau dari 5 aspek, yaitu kondisi fisik, ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana, sosial, dan juga bahaya (*hazard*). Persamaan penelitian ini yaitu memiliki satu variabel yang sama yaitu permukiman kumuh, perbedaan pada penelitian ini yaitu Lokasi dan responden berbeda serta metode penelitian yang digunakan berbeda.

Penelitian Ruhaida dan Sunarti (2012) berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Pada Kegiatan Pnpm Di Kelurahan Muarareja Kota Tegal". Dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat melalui PNPM dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kelurahan Muarareja?. Hasil penelitian bahwa bentuk pemberdayaan pada kegiatan PNPM, upaya yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya yaitu membantu masyarakat membentuk organisasi berupa kelompok swadaya yang membuka *link* kepada masyarakat untuk mendapat hak mereka mendapatkan permukiman yang layak. Kegiatan *social learning* yang dilakukan berupa pembuatan proposal, pelatihan kepemimpinan, dan pembuatan RJM. Namun, dalam tahap pembangunan masyarakat kurang mamu berpartisipasi secara optimal karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Hal tersebut juga terjadi pada tahap pemeliharaan.

Bentuk kegiatan pemberdayaan tersebut terdiri dari proses pembuatan proposal kegiatan, pelaksanaan kegiatan lingkungan seperti: RTLH (Rehab Rumah Tidak Layak Huni), pembuatan jalan Paving, pembuatan Talud, dan perpipaan, dan peran masyarakat dalam pemeliharaan pembangunan. Persamaan penelitian ini yaitu memiliki dua variabel yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat, dan kualitas permukiman kumuh, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu Lokasi dan responden berbeda serta metode penelitian yang digunakan berbeda.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011).

Lokasi penelitian sudah dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba Kota Madya Pematang Siantar. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2020. Penentuan sumber data pada responden yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2011). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non probability sampling yaitu *sampling incidental*. Penulis menggunakan metode penelitian dengan empat cara yaitu : observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang dilakukan melalui tiga cara yaitu : analisis sebelum di lapangan, analisis data di lapangan model Miles and Huberman, dan analisis data di lapangan Model Spradley (analisis domain, analisis taksonomi, analisis tema kultural), dan menggunakan pengujian keabsahan data melalui tiga cara yaitu : uji kredibilitas, pengujian *transferability*, pengujian *dependability* dan pengujian *confirmability*.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat

Tanjung Pinggir adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba, Pematangsiantar, Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan Siantar Martoba merupakan salah satu kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kota Pematangsiantar. Pola Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba Pematang Siantar. Permasalahan yang dikaji difokuskan pada permasalahan utama, yaitu: tanggapan masyarakat terhadap pola pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan hambatan-hambatan dalam-dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Pemberdayaan Program Jumat Bersih pada setiap hari jumat tiap bulannya, retribusi sampah, memberikan penyuluhan mengenai sanitasi dan kesehatan. Partisipasi dunia usaha, pendanaan dan pembiayaan.

Pola pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan pengembangan kawasan permukiman untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka dapat meningkatkan kesetaraan hidup. Permukiman kumuh dijadikan sebagai prioritas program penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman didaerah kota Pematang Siantar yaitu, program percontohan pemukiman kembali (resettlement), Peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan penanganan permukiman kumuh dan informal (liar) secara progresif terutama di tingkat kota (*city-wide level*) melalui unit-unit pemerintah daerah yang terkait.

### Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh

Usaha peningkatan kualitas hidup meliputi (1) mensosialisasikan dan memfasilitasi program peningkatan kualitas lingkungan permukiman, (2) melakukan penyusunan data base permukiman kumuh tingkat kabupaten dan kota. 3) melakukan evaluasi proses pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, serta efektifitas program peningkatan kualitas lingkungan, (4) serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan dan konsultan pendamping (Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan Propinsi Bali, 2004).

Adanya swadaya masyarakat pada pelaksanaan kegiatan fisik merupakan partisipasi riil dari masyarakat terhadap program peningkatan kualitas lingkungan ke arah mandiri melalui program pendampingan masyarakat. Program ini memerlukan penunjukkan tenaga pendamping masyarakat, yang sebaiknya dipilih oleh masyarakat. Konsep penanganan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, meliputi pemberdayaan sosial masyarakat, pemberdayaan usaha, serta pemberdayaan prasarana dan sarana lingkungan.

Ketiga aspek tersebut merupakan suatu proses peningkatan kemampuan, penggalan sumberdaya lokal, serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam peningkatan kualitas lingkungannya secara mandiri. Peran tersebut dapat dilihat dalam berbagai usaha penanganan lingkungan permukiman kumuh, diantaranya perbaikan kampung, bantuan penataan, perbaikan dan rehabilitasi kawasan kumuh, peremajaan lingkungan, dan perbaikan lingkungan. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pada kegiatan usaha ekonomi produktif dapat didekati dari potensi usaha ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan merangkum aspirasi masyarakat tentang berbagai upaya pengembangan usaha ekonomi lokal.

Pengembangan peran aktif masyarakat melalui kegiatan swadaya pada setiap pelaksanaan pembangunan akan lebih mudah pada masyarakat seperti ini. Hal ini perlu disadari dalam upaya pengembangan usaha masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas lingkungan permukiman sehingga sesuai dengan potensi usaha dan kelompok usaha kecil masyarakat yang sudah ada baik dari sektor primer, sekunder maupun tersier.

Selanjutnya, program kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebesar-besarnya dilakukan untuk mendukung usaha-usaha masyarakat, menumbuhkan usaha produktif masyarakat, menyediakan prasarana dan sarana pengembangan usaha, serta meningkatkan sikap

pengabdian dan loyalitas pada perbaikan lingkungan. Pemberdayaan prasarana dan sarana lingkungan melalui pendayagunaan, yang berintikan kegiatan pelaksanaan pembangunan perumahan, prasarana dan sarana, dijaga keterkaitannya dengan lingkungan sekitar. Program kegiatannya meliputi penataan kawasan permukiman, perbaikan lingkungan perumahan swadaya, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar permukiman, yang mencakup perbaikan jalan lingkungan, jalansetapak, drainase, penyediaan air bersih, sanitasi dan penanganan persampahan.

Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh berarti bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat agar mau turut serta ambil bagian dalam berbagai kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungannya. Usaha pemberdayaan masyarakat adalah dengan mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan memperbaiki hidupnya sendiri. Keterlibatannya, dapat berupa aktivitas dalam wujud sumbangan pikiran, pendapat maupun tindakan, dapat pula berupa urun biaya, material untuk perbaikan lingkungannya. Pada hakekatnya pemberdayaan dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 5 tahap kegiatan, yaitu kegiatan dalam pengambilan inisiatif, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman.

Pertama, pada tahap pengambilan inisiatif dimana masyarakat dikenalkan terhadap pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang mempunyai tujuan meningkatkan potensi masyarakat. Pada tahap ini masyarakat diberikan penyadaran, dorongan, motivasi, kesempatan termasuk pula kewenangan yang sifatnya sesuai dengan fungsi dan perannya. Selanjutnya dikenalkan berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan permukimannya, sehingga dari pemahaman mereka dapat memunculkan berbagai ide maupun gagasan yang positif, karena tanpa pemahaman permasalahan biasanya kesulitan dalam memunculkan inisiatif.

Peran pemimpin atau penguasa desa dinas maupun adat sangat potensial dalam mengambil inisiatif, karena punya wewenang dan kemampuan dalam menggerakkan masyarakat di lingkungan desanya. Pengambilan inisiatif ini tidak hanya oleh orang yang berkuasa, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perorangan, kelompok orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat termasuk lembaga pemerintahan yang bersifat adat dan ataudinas.

Kedua, Sebagaimana kita ketahui perencanaan suatu lingkungan permukiman sangatlah kompleks, meliputi perencanaan ruang fisik (*spatial*) dan non-ruang (*aspatial*). Perencanaan ruang fisik berupa berbagai wujud rumah, perumahan, sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Perencanaan non-ruang dalam wujud idealisme, aspirasi, sikap perilaku dari berbagai kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat yang serbaneka.

Ketiga, pada tahap pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, masyarakat dapat berperan dalam berbagai bidang, misalnya dalam penyediaan lahan, bahan bangunan, tenaga kerja, menjaga ketertiban, keamanan dan sebagainya. Masyarakat dapat mengambil kesempatan dan pengalaman dimana perlu diperhatikan fungsi dan peran masyarakat termasuk prosedur- prosedur yang harus dipatuhi agar tidak terjadi konflik, karena hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

Keempat, program peningkatan kualitas lingkungan permukiman sering kita jumpai berupa program perbaikan menyangkut hal-hal yang bersifat dinas dan adat. Perbaikan yang bersifat dinas, misalnya perbaikan jalan, riol, kantor desa, sekolah, puskesmas maupun pasar desa. Sedangkan perbaikan yang bersifat adat, misalnya perbaikan bangunan pura, perbaikan jalur prosesi ritual, perbaikan tempat-tempat yang disucikan dan sebagainya.

Peranserta tokoh atau pemimpin masyarakat dapat memerankan fungsi tersebut karena mereka memiliki wewenang untuk mengatur masyarakatnya. Pemimpin masyarakat dapat dikonsepsikan sebagai pihak yang berkompeten dan memiliki fungsi keperantaraan antara pemilik program peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pelaksana dan masyarakat. Pemberdayaan disini dikaitkan dengan pemberian petunjuk-petunjuk terhadap kekeliruan dalam pelaksanaan rencana atau merupakan perbaikan dari rencana semula. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengawasan dapat merinci bagian-bagian yang harus



disesuaikan dengan rencana. Pada tahap evaluasi dalam penataan lingkungan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sudah tentu terdapat kesesuaian, ketidaksesuaian, kekeliruan dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya.

Kelima, pada tahap pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman merupakan hal yang sangat urgen dilakukan oleh warga masyarakatnya. Keberhasilan pengelolaan lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh aktivitas warga yang bersifat membina, membangun dan mengembangkan lingkungannya. Berbagai program yang telah dilaksanakan dengan baik, masyarakat tetap diharapkan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungannya melalui kesadaran murni dalam berbagai bentuk partisipasi. Usaha memanfaatkan, membina, dan melestarikan alam lingkungan sekitarnya merupakan usaha positif dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman, sebab kalau tidak demikian maka lingkungan akan segera kembali menjadi lingkungan permukiman kumuh.

Pemberdayaan masyarakat harus tetap dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, sampai melakukan pemeliharaan agar kualitas lingkungan minimal sama, atau bila dimungkinkan kualitasnya meningkat dengan adanya partisipasi aktif dari warga masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan, seperti mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga-lembaga formal dan non-formal, menentukan dan mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab warga, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, pemeliharaan lahan dan air, dan potensi alam lingkungan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukimannya.

### **Faktor-faktor Penghambat Internalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh Di Kecamatan Martoba Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Madya Pematang Siantar**

Faktor Internal, Faktor yang mempengaruhi adalah karakteristik individu yang bersangkutan. Karakteristik pribadi ini merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan lingkungannya. Menurut Anwas (2019), karakteristik pribadi terbentuk oleh faktor biologis yang mencakup genetik, sistem syaraf dan sistem hormonal, serta faktor sosio-psikologis yaitu berupa komponen-komponen konatif yang berhubungan dengan kebiasaan dan efektif. Adapun karakteristik pribadi dari suatu individu meliputi: faktor: umur atau usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, motivasi, status sosial ekonomi, bangsa, agama, kepribadian atau personalitu, dan aspek pribadi lainnya.

Umur, seringkali diasumsikan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar dan efisiensi belajar. Menurut Anwas (2019), umur atau usia seseorang berhubungan dengan kemampuan, kemauan belajar, dan fleksibilitas. Umur juga berhubungan dengan pengalaman, artinya umur yang tua relatif memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan yang muda.

Pengalaman bekerja merupakan serangkaian pengetahuan dan pengalaman hidup yang dialami individu selama yang bersangkutan bekerja. Ini berarti pengalaman kerja dengan sendirinya ikut membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Asumsinya semakin lama seseorang menekuni suatu bidang tertentu, maka kemampuan di bidang tersebut semakin tinggi. Begitu pula jenis kelamin, status sosial ekonomi, motivasi, suku bangsa, agama, dan karakteristik lainnya dapat memberikan kontribusi dalam membentuk perilaku dan kemampuan seseorang (Adam, 2020; Santifa et al., 2019).

Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu dalam berpikir dan berperilaku. Oleh karena itu tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang, ada kecenderungan semakin tinggi pula pengetahuan, sikap, dan keterampilan, termasuk kemampuan dalam bekerja. Artinya tingkat pendidikan mempengaruhi terhadap kompetensi seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba Pematang Siantar bahwa masih banyak masyarakat yang pendidikan nya masih sangat harus diperhatikan, masih ada beberapa masyarakat yang pendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Dengan

pendidikan tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masyarakat permukiman kumuh sebagai buruh.

Faktor Eksternal yaitu dukungan lingkungan, pendidikan dan latihan. Dukungan lingkungan merupakan faktor-faktor di luar diri individu (eksternal) yang mempengaruhi dalam kehidupannya. Pengaruh karakteristik lingkungan tersebut jika mendukung atau sesuai dengan kebutuhan seseorang maka akan membantu dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas. Sebaliknya apabila tidak sesuai bisa menjadi penghambat. Beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap seseorang diantaranya kebijakan pemerintah, dukungan keluarga, dukungan kelembagaan, serta dukungan masyarakat.

Lingkungan di permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba Pematang Siantar berdasarkan hasil pemantauan dengan berkeliling di kawasan tersebut bahwa lingkungan juga mempengaruhi faktor penghambat karena di sekitar permukiman kumuh ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dimana dalam satu jam ada saja bus yang membuang sampah sampai berantri-antri.



Gambar 1. Peneliti di Permukiman Kumuh  
Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba  
Sumber : Peneliti, Jumat 21 Agustus 2020

## SIMPULAN

Pola-pola pemberdayaan di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba Pematang Siantar meliputi pola pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat dan PMJK serta tatanan rumah tangga dimana permukiman kumuh berada dipinggir tanah garapan. Peran Pemerintah dan peranserta tokoh atau pemimpin masyarakat dapat memerankan fungsi tersebut karena mereka memiliki wewenang untuk mengatur masyarakatnya. Pemimpin masyarakat dapat dikonsepsikan sebagai pihak yang berkompeten dan memiliki fungsi keperantaraan antara pemilik program peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pelaksana dan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh adalah faktor, pendidikan, ekonomi dan faktor lingkungan. Dimana masyarakat permukiman kumuh di kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba Pematang Siantar masih ada yang pendidikan terakhirnya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga membuat masyarakat permukiman banyak yang bekerja sebagai buruh, ditambah lagi faktor lingkungan dimana di daerah permukiman tersebut menjadi pusat tempat pembuangan akhir sehingga lingkungan tersebut menjadi kumuh. Namun seharusnya masyarakat permukiman kumuh bisa memberdayakan sampah-sampah menjadi sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat tersebut. Setelah

penelitian ini diselesaikan bisa dikembangkan sebagai pengabdian kepada masyarakat sehingga permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Pinggir Martoba bisa sebagai desa binaan, semoga.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada dana hibah Strategis Nasional (DP2M) Dikti Tahun 2020 yang telah memberikan dana penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam (2020). Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Untuk Petani Serai Wangi. *PERSPEKTIF*, 9 (1): 66-78.
- Alit, I.K. (2005). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Di Propinsi Bali. *Jurnal Permukiman Natah*, 3(1): 34-43.
- Anisa Riyulida Dan S Sunarti. (2019). Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Untuk Mendukung Wisata Kampung Pelangi Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 15(2): 83-95.
- Anwas, O.M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Anwas, O.M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan Propinsi Bali. (2004), Konsultan Manajemen Wilayah Propinsi Bali. Denpasar: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Bali Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan Propinsi Bali.
- Fitria, N., & Setiawan, R.P. (2014). Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *JURNAL TEKNIK POMITS*, 3(2):240-244.
- Hikon, W.M.L. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengubah Permukiman Kumuh Menjadi Destinasi Wisata. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 8(3): 108-113.
- Kurniasih, S. 2007. Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petungkang Utara-Jakarta Selatan. Universitas Indonesia: Jakarta
- Mudana, I.W. (2017). Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Tujuan Wisata Bahari Di Kabupaten Karangasem. *Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(3): 307-323.
- Rakhmat, J. 2002. Psikologi komunikasi edisi revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ruhaida dan Sunarti, (2012) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Pada Kegiatan PNPM Di Kelurahan Muarareja Kota Tegal. *Jurnal Teknik PWK*, 1(1): 46-56.
- Santifa, M., Warjio, W., Harahap, D., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 89-98.
- Santosa, D.A. (2017). Pengembangan Apresiasi Budaya Masyarakat Terhadap Pembangunan Museum Gerabah di Kasongan Bantul. Kepel Press. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung.
- Wilandari, A. & Sulistyarso, H. (2017). Arahkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi. *JURNAL TEKNIK ITS*, 6(2): 557-560.